

H A R I A N

LENTERA*Inspirasi Perubahan* **TODAY**

EDISI JUMAT / 04 Desember 2020

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

Pada akhirnya perlindungan vaksinlah yang akan memungkinkan kita untuk mendapatkan kembali hidup kita dan membuat ekonomi bergerak lagi

Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris

CORONA INDONESIA MELEDAK, INI BELUM PUNCAK!

Bukan mereda, tapi kasus baru Covid-19 di Indonesia malah meledak di akhir tahun ini. Pada Kamis (3/12) penambahan infeksi mencapai rekor lagi yaitu 8.369 kasus hanya dalam waktu 24 jam. Banyak pihak mengatakan ini terjadi akibat 'kombinasi mematikan': kejenuhan warga yang dibatasi aktivitasnya dan kebijakan pemerintah yang 'lembek'. Sebut saja aksi aparat yang telat saat ada gelombang demo dan kisruh Petamburan. Belum lagi acara resmi negara, Pilkada 2020 dengan rentetan kampanye hingga hari pencoblosan, yang seolah 'memberi karpet merah' berkumpulnya massa. Bahkan, saat Presiden Jokowi bilang RI waspada gelombang 2 corona, para ahli mengatakan negeri ini sebenarnya belum sampai pada puncak gelombang pertama. Lho! Warga diminta tertib tapi pemerintah tidak komit? Ya...Ambyar!


 **SCAN ME**

Baca Hal 11

REKOR HARIAN PECAH EMPAT KALI

3 Desember 2020

8.369 kasus baru

29 November

6.267 kasus

27 November

5.838 kasus

25 November

5.534 kasus

TIGA POTENSI LEDAKAN PENULARAN DALAM SEBULAN KE DEPAN

Pilkada Serentak

9 Desember

Libur Panjang Akhir tahun

24-27 Des 2020 dan
31 Des 2020 - 3 Jan 2021

Sekolah Tatap Muka

Dimulai Januari 2021

SATU SEMESTER SEKOLAH SAMBIL REBAHAN

Pandemi Covid-19 sudah menghantui Indonesia selama kurang lebih 9 bulan. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pun lunas dilakukan selama satu semester. Seperti diketahui, meski ada wabah, tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada 13 Juli 2020 lalu. Sejak itu, siswa dan guru mau tidak mau harus melakukan kegiatan belajar dari rumah masing-masing via daring (online).

Zoom dan Google Class pun menjadi andalan. Pekerjaan rumah bisa dikerjakan sambil rebahan ditemani cemilan. Di akhir tahun ini para orangtua mulai 'ketar-ketir' karena pemerintah mensinyalkan sekolah tatap muka akan kembali diselenggarakan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim memutuskan sekolah tatap muka bias kembali dilaksanakan Januari 2021. Dalam Rakornas Pembukaan Sekolah Pada Masa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan KPAI (30/11/2020), Nadiem mengungkapkan pembelajaran jarak jauh memang menjadi upaya pencegahan penyebaran Covid-19, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan harus tetap diperhatikan.

Hasil evaluasi pembelajaran jarak jauh menunjukkan anak berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang. Banyak anak mengalami tekanan psikologis sehingga mempengaruhi perkembangan kognitif maupun karakter.

Angka putus sekolah pun terancam meningkat. Tak sedikit anak yang dilibatkan bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Apalagi selama Covid-19 hampir semua sektor terdampak.

Tentu saja sekolah tatap muka tak bisa dilakukan serentak. Pelaksanaan bergantung pada kesiapan sekolah, persetujuan dari pemerintah setempat, dan tentunya izin dari orang tua / wali murid. Zona tiap daerah tak lagi jadi patokan utama.

Sekolah dianggap siap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka jika memiliki fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Jarak

antar bangku minimal 1,5 meter, dengan jumlah maksimal 18 orang atau 50% dari total keseluruhan siswa di setiap kelas.

Jam belajar pun dipersingkat, ekstrakurikuler dan kegiatan luar kelas ditiadakan. Saat istirahat siswa hanya boleh makan makanan dari rumah. Soal transportasi, siswa wajib dijemput ketika sekolah usai agar tidak bermain sepulang sekolah.

Tentu saja kebijakan ini mendapat respon beragam dari guru dan orangtua. Di satu sisi, pembelajaran tatap muka mempermudah guru menyampaikan materi pelajaran. Penanaman nilai-nilai karakter pun lebih mudah jika guru dan murid bertemu langsung. Akan tetapi, guru juga harus mempersiapkan materi untuk siswa yang belajar daring. Bisa dibayangkan, guru harus 'kerja dua kali'.

Di sisi lain, orangtua yang merasa anaknya sudah bosan belajar daring sangat mendukung kebijakan ini. Kelas online diikuti hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tugas sekolah pun tak lagi dikerjakan. Belum lagi biaya kuota internet harian yang cukup menguras kantong.

Meski begitu, ancaman penyebaran Covid-19 membuat beberapa orangtua tetap memilih belajar daring. Dikhawatirkan apabila kembali ke sekolah anak sulit menerapkan protokol kesehatan dan saling menularkan satu sama lain. Apalagi akhir-akhir ini angka Covid-19 di Indonesia kembali naik.

Per tanggal 02 Desember 2020 kasus covid-19 di Indonesia sebanyak 549.508 positif, 17.199 kematian, dan 73.429 dirawat. Martadi, Ketua Bidang Pengembangan Profesi Pendidik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru memutuskan pembelajaran tatap muka. Tren perkembangan penyebaran covid-19 harus terus dipantau.

Pemerintah Indonesia memang sedang menyiapkan vaksin dengan harga terjangkau untuk beberapa kelompok sasaran utama, termasuk tenaga pendidik sebanyak 4,3 juta orang. Sayangnya kepastian vaksinasi belum menemukan titik temu. Terbaru, PT Bio Farma mengumumkan vaksinasi covid-19 di Indonesia bisa dilakukan setelah mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM, yakni awal Februari 2021.

Kemendikbud juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non PNS. Bantuan senilai Rp 3,66 triliun diberikan kepada 2.034.732 orang terdiri dari 162.277 dosen PTN dan PTS, 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi. Bantuan diberikan sebanyak 1 kali sebesar Rp1.800.000.

Berbagai upaya telah dilakukan, tapi masih banyak pekerjaan rumah menanti. Langkah-langkah antisipatif wajib dipersiapkan agar penyebaran covid-19 pada anak tidak meningkat. Dicky Budiman, Epidemiolog dari Universitas Griffith, mengungkapkan hingga kini kasus covid-19 yang menimpa anak mencapai 11 persen.

Sosialisasi 3T kepada tenaga pendidik dan orangtua juga perlu digencarkan. 3T terdiri dari pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) bertujuan agar pemeriksaan dapat dilakukan lebih awal, sehingga perawatan lebih cepat, dan potensi penularan dapat dicegah. Komisioner KPAI, Retno Listyarti, menyarankan tes swab kepada seluruh tenaga pendidik dan pelajar wajib dilakukan secara besar-besaran jika pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan. Jika ada bukti terinfeksi, sekolah harus siap ditutup.

Mengingat persiapan menuju pembelajaran tatap muka di tahun 2021 terbilang singkat, tentu kita berharap hal ini tak menyurutkan semangat tenaga pendidik dan seluruh pihak terkait untuk merumuskan formula terbaik bagi pendidikan Indonesia. (*)



DPR SERUKAN TNI-POLRI TEGAKKAN ATURAN DI PAPUA DAN SIGI

Jakarta- Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak dari Indonesia pada Selasa 1 Desember 2020 kemarin. Deklarasi Papua Barat tersebut diprakarsai oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), suatu kelompok yang sejak lama ingin memerdekakan Papua Barat dari Indonesia. ULMWP telah memilih Benny Wenda sebagai Presiden Interim atau sementara untuk menjalankan pemerintahan di Papua Barat.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan DPR mendukung penuh setiap kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Demikian halnya langkah yang diambil TNI dan Polri untuk menegakkan aturan sekaligus menciptakan stabilitas keamanan.

"Menyikapi perkembangan yang sama-sama ketahu di Papua, Papua Barat, dan Sigi, tentu kami dari DPR telah bicara dan support pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf, khususnya aparaturnya TNI dan Polri untuk tegakkan mekanisme dan aturan sesuai UU yang berlaku," kata Azis saat jumpa pers di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/12).

Pada kesempatan itu, Azis didampingi Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Robert J Kardinal. Azis menegaskan Papua dan Papua Barat merupakan wilayah NKRI. "Dalam konteks Papua dan Papua Barat, ini merupakan bagian dari NKRI. Kami harap TNI Polri untuk tegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku secara objektif dan terukur. Hal ini untuk menjaga keutuhan NKRI, dan keselamatan seluruh warga negara," tegas Azis.

"Begitu juga kejadian yang ada di Sigi yang kita tahu bahwa DPR juga men-support pemerintah untuk melakukan pencegahan secara preventif dan menegakkan aturan secara tegas dan terukur." Terkait Pilkada Serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020, Azis optimistis teknisnya sudah disiapkan KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Sementara Robert menilai otonomi khusus (Otsus) menjadi solusi terbaik untuk pembangunan Tanah Papua ke depan semakin baik. "Teman-teman DPR Papua dan Papua Barat mendukung pemerintah. Kami juga terus mendengar aspirasi dari semua rakyat dan stakeholders. Hal-hal yang belum sempurna kita sempurnakan dan yang belum ada kita tambahkan," ujar Robert.

Mahfud : Negara Ilusi

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, menyebut Benny Wenda 'membuat negara ilusi'. "Benny Wenda membuat negara ilusi, negara yang tidak ada. Papua Barat itu apa?" cetus Mahfud MD dalam pernyataan pers, Kamis (03/12).

Merujuk Traktat Montevideo pada 1933, Mahfud MD menjelaskan syarat berdirinya sebuah negara adalah keberadaan rakyat, wilayah, dan pemerintah. "Rakyatnya siapa? Dia memberontak, dia orang luar. Wilayahnya, Papua. Kita riil yang menguasai. Pemerintahnya, siapa yang mengakui dia sebagai pemerintah? Orang Papua sendiri tidak juga mengakui," kata Mahfud MD.

Ia mengatakan Majelis PBB sudah menetapkan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia setelah dilaksanakannya refe-

rendum tahun 1969. "PBB tak mungkin buat putusan dua kali terhadap hal sama," katanya. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh deklarasi itu, yang menurutnya, "hanya dilakukan di Twitter".

Pemerintah, lanjut Mahfud, mengatakan bahwa pemerintah akan fokus melakukan pendekatan kesejahteraan pada Papua. Salah satunya dengan merencanakan perubahan UU 21/2001 tentang otsus dengan menaikkan anggaran untuk otsus, dari 2% ke 2,25%. Pemekaran wilayah Papua, katanya, juga direncanakan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan pada Orang Asli Papua (OAP).

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) - sayap militer OPM yang berulang kali melakukan kontak senjata dengan militer Indonesia - pun tidak mengakui klaim ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua - ULMWP) Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat.

"TPNPB tidak akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua, dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi," ujar juru bicara TPNPB-OPM, Seby Sambom.

"TPNPB-OPM juga tidak bisa akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum internasional bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi presiden republik Papua Barat," tegasnya. (ist)

KATA MEREKA

WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN

"Menyikapi perkembangan yang sama-sama ketahu di Papua, Papua Barat, dan Sigi, tentu kami dari DPR telah bicara dan support pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf, khususnya aparaturnya TNI dan Polri untuk tegakkan mekanisme dan aturan sesuai UU yang berlaku."

MENKO POLHUKAM, MAHFUD MD

"Benny Wenda membuat negara ilusi, negara yang tidak ada. Papua Barat itu apa? Rakyatnya siapa? Dia memberontak, dia orang luar. Wilayahnya, Papua. Kita riil yang menguasai. Pemerintahnya, siapa yang mengakui dia sebagai pemerintah? Orang Papua sendiri tidak juga mengakui."

JURU BICARA TPNPB-OPM, SEBY SAMBOM

"TPNPB tidak akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua, dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi. Benny Wenda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum internasional bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi presiden republik Papua Barat."



BENNY WENDA

1 Desember 2020 Organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat Merdeka dengan presiden Benny Wenda. Siapa dia?

- Merupakan putra dari Suku Lani di Lembah Baliem, Papua. Lahir di tahun 1970-an.
- Saat Presiden Soeharto tumbang, Benny didaulat menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (Demmak).
- Terlibat di Presidium Dewan Papua (PDP) yang menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia.
- Benny Wenda ditangkap dan ditahan polisi pada 6 Juni 2002 dengan tuduhan penyerangan Markas Polsek Abepura pada 7 Desember 2000.
- Pada 27 Oktober 2002 Benny Wenda berhasil kabur dari tahanan dengan menjebol lubang ventilasi.
- Berkat sokongan LSM Eropa, ia menuju Inggris dan mendapat suaka di tahun 2003. Saat ini berstatus sebagai warga negara Inggris. Pemerintah Indonesia kemudian memasukkan namanya ke dalam daftar pencarian Interpol pada 2011. Benny Wenda dituduh melakukan sejumlah kejahatan seperti pembunuhan dalam peristiwa Abepura.
- Benny Wenda bersama rekan-rekannya membentuk serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) pada 8 Desember 2014. Benny Wenda pernah mendapat penghargaan Freedom of Oxford atau penghargaan tertinggi di kota Oxford, Inggris.



PEMKOT SURABAYA SALURKAN HIBAH PARIWISATA KE 212 HOTEL DAN 783 RESTORAN

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan perwakilan hotel dan restoran yang menjadi calon penerima hibah pariwisata. Dana hibah ini sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meringankan beban industri hotel dan restoran selama pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, sebanyak 212 hotel dan 783 restoran di Kota Surabaya lolos verifikasi dan dianggap layak menerima dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

"Hibahnya berupa uang yang diserahkan ke rekening pemilik hotel dan restoran secara langsung," kata Antiek sesuai kegiatan penandatanganan NPHD dengan perwakilan hotel dan restoran di Lantai 2 Mall Pelayanan Publik Siola, Kamis (3/12).

Antiek menjelaskan, jumlah dana yang diterima setiap hotel dan restoran secara proporsional besarnya tergantung dari jumlah pajak yang dibayar ke daerah sejak tahun 2019. "Masing-masing berbeda, ada perhitungan yang dihitung dari pusat kontribusi besaran mereka membayar pajak. Ada yang Rp 1 juta, ada pula sampai Rp 2 miliar lebih," katanya.

Industri usaha yang berhak menerima dana hibah pariwisata ini adalah hotel dan



Penandatanganan NPHD Pemkot Surabaya dengan perwakilan hotel dan restoran di Lantai 2 Mall Pelayanan Publik Siola, Kamis (3/12)

restoran yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan pemerintah pusat. Di antaranya, hotel dan restoran itu telah membayar pajak di tahun 2019 di daerah penerima hibah. Kemudian, hotel dan restoran masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada Agustus tahun 2020.

Selanjutnya, kata Antiek, hotel dan restoran memiliki perizinan berusaha yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang masih berlaku. Selain itu, syarat lainnya adalah industri usahanya masuk di dalam daftar KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) hotel dan restoran. "Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian. Setelah memenuhi syarat pengajuan, maka ini NPHD langsung ditransfer dari kementerian," terangnya.

Menurut Antiek, dana hibah pariwisata ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Sebab, salah

satu industri usaha yang terdampak pandemi Covid-19 ini adalah hotel dan restoran. "Sehingga hotel dan restoran diberikan insentif. Karena ketika pandemi, usaha hotel dan restoran banyak yang tidak hidup," jelas dia.

Antiek yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya ini menambahkan, dana hibah pariwisata ini diprioritaskan untuk membantu biaya operasional hotel dan restoran. Seperti, kebutuhan Clean, Health, Save dan Environment (CHSE) untuk penerapan protokol kesehatan di tempat usaha.

"Diprioritaskan untuk menyiapkan protokol kesehatan di tempat usahanya. Kemudian bisa digunakan untuk membayar gaji pegawai, membayar biaya operasional mereka, seperti listrik, air dan sebagainya," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur PT Sushi Tei Surabaya, Steven Johnson Tjan mengaku bisa sedikit bernafas lega. Sebab, adanya bantuan dana hibah pariwisata dari pemerintah pusat ini sedikit banyak membantu usaha restaurannya untuk tetap beroperasi. "Saya rasa dengan bantuan ini cukup membantu, artinya 10-20 persen cukup membantu," kata Steven.

Steven ungkapkan, bahwa pandemi Covid-19 berdampak begitu besar terhadap usaha restaurannya. Bahkan, karena pandemi, pihaknya harus merumahkan ratusan karya-wan agar usahanya tetap dapat bertahan. (Ard)

CATUT MENSOS, BANTUAN PKH KOTA BLITAR JADI ALAT KAMPANYE DUKUNG PETAHANANA

BLITAR - Nama Menteri Sosial RI, Juliari Batubara dicatut dan dijadikan alat kampanye Pilkada 2020 di Kota Blitar. Strateginya saat memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), penerima dikabarkan diarahkan untuk memilih petahana pada 9 Desember nanti.

Hal ini mencuat dari rekaman yang didapatkan salah satu warga Kota Blitar, Reza. Dia mengaku ditanya temannya apakah boleh pendamping PKH berkampanye. "Memihak salah satu paslon, karena sama partainya dengan pak menteri (Mensos)," ujar Reza, Kamis (3/12).

Reza mengaku kaget mendengar isi rekaman yang berisi percakapan antara pendamping PKH (suara perempuan) dan ibu-ibu penerima bantuan di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. "Dalam percakapan itu, penerima PKH diminta bantuannya memilih paslon walikota yang partainya sama dengan Pak Mensos yang benderanya merah. Karena ini pesan Pak Mensos, agar bantuan PKH bisa terus berlanjut. Kalau walikotanya ganti, nanti visi misinya tidak sama," ungkap Reza menjelaskan isi rekaman.

Koordinator PKH Kota Blitar, Nawawi ketika dikonfirmasi mengenai isi dari rekaman tersebut mengaku sudah tahu dan membenarkan,

bahkan pihaknya sudah melakukan klarifikasi. "Sudah kami hentikan kegiatan tersebut, sudah kita bina dan peringatkan. Bahkan laporannya sudah masuk ke Bawaslu Kota Blitar," tuturnya.

Adanya pendamping yang melakukan kampanye dengan memanfaatkan program bantuan PKH dari Kemensos tersebut, ada 2 orang dari Kecamatan Sukorejo. "Itu adalah inisiatif pribadi, bukan perintah dari pengurus PKH. Makanya hentikan, serta diminta tidak melakukannya lagi," tandas Nawawi.

Karena sudah masuk laporan ke Bawaslu Kota Blitar, pihak pengurus PKH Kota Blitar akan siap dipanggil jika dimintai keterangan tegasnya. Ditanya mengenai sanksi bagi 2 orang pendamping yang memanfaatkan bantuan PKH untuk kampanye, serta membawa-bawa nama Mensos. Nawawi mengaku ada sanksinya, tapi menunggu hasil dari proses di Bawaslu. "Eksekusinya nanti yang memutuskan pusat, karena SK kita dibawah SDM Kementerian Sosial," pungkasnya.

Dalam rekaman berdurasi 6 menit 30 detik tersebut, pendamping PKH mengatakan mendapat perintah dari pusat melalui Mensos Juliari ketika menghadiri acara di Kota Batu beberapa waktu lalu. Kalau terkait Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, pe-



Warga Kota Blitar menerima BLT dari Kemensos beberapa waktu lalu

nerima PKH diminta tidak golput. Kemudian, juga diminta bantuannya mendukung paslon dalam Pilkada di daerah masing-masing yang benderanya sama warna merah. "Maksudnya bendera merah kalau di Kota Blitar nggeh calon No. 2 yang sama-sama dari PDIP nya. Tujuannya, karena sama dari PDIP visi misinya sama, jadi lebih kuat," kata pendamping PKH perempuan dalam rekaman tersebut.

Bukan cuman ibu-ibunya tapi juga keluarganya, diajak memilih paslon No. 2 tapi dilarang mengatakan diminta pendamping PKH. Diminta kesadarannya, karena sudah dibantu mendapat bantuan program PKH.

Terakhir dalam rekaman tersebut, pendamping tadi minta pembicaraan ini dirahasiakan jangan sampai bocor. "Pokoknya nanti pas 9 Desember, coblos paslon No. 2. "Jangan sampai bocor ya, nanti kalau ketahuan calon No.1 jadi ramai," pesannya. (ais)

PASIEEN CORONA BISA NYOBLOS KE TPS? INI TANGGAPAN DOKTER

Jakarta - Menuju hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU), melalui Instagram resminya mengunggah sebuah gambar terkait cara pemilihan bagi pasien Covid-19.

Gambar tersebut bertujuan agar pasien Covid-19, baik yang isolasi mandiri di rumah maupun rawat inap tidak kehilangan hak pilih. Dari gambar yang diunggah itu, disebutkan dua petugas didampingi dua saksi menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap akan mendatangi pemilih. Pasien Covid-19 akan melakukan pencoblosan saat Pilkada 2020 di tempat mereka diisolasi atau dirawat.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI-Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Prof. Dr. dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP berpendapat bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada pasien yang terinfeksi Virus Corona perlu koordinasi dengan pihak

rumah sakit. "Prinsipnya, petugas harus menggunakan APD yang lengkap tapi proses itu harus dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit," kata Ari, Kamis (3/12).

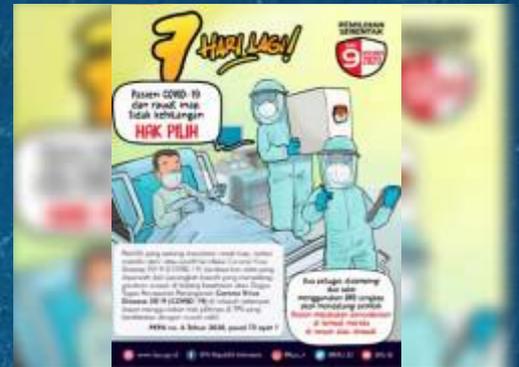
Di sisi lain, jumlah panitia Pilkada 2020 yang masuk pun harus sangat dibatasi maksimal dua orang. Sedangkan dalam unggahan Instagram KPU petugas yang masuk sebanyak empat orang, dua petugas didampingi dua saksi.

Unggahan KPU juga menjelaskan bahwa pasien Covid-19 dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) yang berdekatan dengan rumah sakit sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 72 ayat 1.

Jika maksudnya pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 boleh meninggalkan ruang isolasi dan mendatangi TPS, maka hal ini tidak disetujui oleh Ari.

Dengan demikian, lebih memungkinkan jika petugas yang datang ketimbang pasien yang ke TPS. Walau demikian, kondisi

pasien pun harus menjadi pertimbangan. Yang dapat memilih hanya pasien-pasien yang memungkinkan. "Artinya tidak mungkin pasien berat (memberi suara). Pilih pasien yang bisa berkomunikasi dengan baik, tidak sesak napas, mesti dilihat juga tetap tidak semua pasien yang bisa nyoblos, nanti dokter yang menentukan," kata Arie menekankan. (Ist)



1

ERI CAHYADI ARMUDJI

CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA

BPJS Kesehatan Gratis Warga Bergaji Maksimal 10 Juta/Bulan

Gratis SMA/SMK Warga Kurang Mampu

Gratis Kuliah 3.000 Anak Muda Per Tahun

Tingkatkan Insentif RT/RW, LPMK, Kader Posyandu, dan Bumantik

Memperbesar Anggaran dan Fasilitas Pendidikan Gratis SD-SMP Negeri

Perbesar Subsidi Sekolah SD-SMP Swasta

CCTV Masuk Kampung Beri Keamanan

Bangun Rumah Sakit di Surabaya Timur dan Selatan

50% Tenaga Kerja Lokal Setiap Investasi Baru

TRI RISMAHARINI
WALI SURABAYA

MENERUSKAN KEBAIKAN

CERDAS PEDULI BERPENGALAMAN

PILIHANE! AREK SUROBOYO!

2

CALON WALIKOTA
Machfud Arifin
CALON WAKIL WALIKOTA
Mujiaman

MACHFUD ARIFIN - MUJIAMAN

Calon Walikota & Calon Wakil Walikota Surabaya 2020

SAIKI MA WAE, OJO LIYANE

"Surabaya butuh figur luar biasa seperti Machfud Arifin."

DAHLAN ISKAN

TOKOH MASYARAKAT SURABAYA & JATIM

Machfud Arifin
 cak.machfudarifin
 Ir. Mujiaman

DEMI PARIWISATA, FILIPINA BERIKAN SUBSIDI TES COVID-19 UNTUK PELANCONG

Photo by Justin Kauffman on Unsplash

Pemerintah Filipina berencana memberikan subsidi untuk tes Covid-19 bagi wisatawan yang datang ke negara tersebut.

Langkah ini bertujuan untuk mendorong industri pariwisata yang tertekan selama pandemi Covid-19. Rencananya, Filipina secara bertahap membuka kembali wisata untuk kalangan domestik.

Dilansir Bloomberg, Menteri Pariwisata Filipina Bernadette Romulo-Puyat mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menanggung hingga 50 persen biaya swab test Covid-19 bagi wisatawan dalam wawancara dengan ABS-CBN News Channel.

Ia mengatakan subsidi ini berupa voucher perjalanan untuk tes bersubsidi dari Rumah Sakit Umum Filipina yang dikelola pemerintah di Manila yang akan diberikan kepada wisatawan. Namun, ia tidak merinci siapa saja yang dapat memenuhi syarat.

"Kami ingin orang-orang bisa bepergian, terutama pada musim Natal kali ini. Biayanya mahal, tetapi kami tidak dapat menghapus persyaratan untuk pengujian sebelum bepergian," ungkapnya dalam wawancara (Selasa, 1/12/2020) seperti dikutip Bloomberg.

Filipina sebelumnya menetapkan batasan harga untuk swab test Covid-19 di tengah keluhan disparitas harga yang

selangit.

Menteri Kesehatan Francisco Duque mengatakan harga batas atas untuk tes real-time reverse transcription polymerase chain reaction atau uji RT-PCR dipatok 5.000 peso (Rp1,47 juta) di rumah sakit swasta dan 3.800 peso (Rp1,12 juta) di laboratorium pemerintah.

Sebelum penetapan batas atas ini, beberapa pusat pengujian mengenakan tarif hingga 13.000 peso (Rp3,82 juta) untuk satu kali pengujian.

Departemen pariwisata juga akan menyeragamkan persyaratan untuk masuk ke tujuan wisata, karena protokol perjalanan yang berbeda yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dianggap membingungkan.

Sektor pariwisata Filipina menyumbang 12,7 persen dari output ekonomi tahun lalu. Filipina kini melonggarkan pembatasan pergerakan untuk meningkatkan ekonomi yang tengah jatuh ke jurang resesi.

Meskipun infeksi harian telah menurun selama tiga bulan pada bulan November, negara ini masih dilanda wabah terburuk kedua di Asia Tenggara, dengan 431.000 kasus tercatat pada hari Senin (30/11/2020).

Pekan lalu sudah ada wacana Filipina akan melonggarkan pembatasan untuk menyelamatkan ekonomi dari resesi.



Photo by Cris Tagupa on Unsplash

Sekretaris Perencanaan Ekonomi Karl Chua mengatakan penurunan kasus virus Corona menjadi latar belakang rencana tersebut.

Di daerah, di mana kasus virus telah menurun, pemerintah daerah mungkin dapat melakukan uji coba untuk mengizinkan lebih banyak anak dan warga lanjut usia untuk pergi keluar agar kegiatan ekonomi terpacu pada akhir tahun.

Dia memperkirakan pertumbuhan akan kembali ke tingkat sebelum pandemi pada pertengahan 2022. Adapun besaran stimulus, menurutnya tidak semata-mata menentukan pemulihan di tengah seruan dari para taipan dan anggota parlemen untuk dukungan fiskal lebih lanjut (Ist).



Photo by Jemel Lin on Unsplash



Aneka Ragam Susu Nabati Dan Manfaatnya



Susu nabati memiliki banyak khasiat seperti meningkatkan pencernaan, mencegah jerawat, meningkatkan penurunan berat badan, meningkatkan metabolisme hingga tingkat energi. Berikut ini adalah beberapa jenis susu nabati dan manfaatnya untuk tubuh, menurut Boldsby :

Susu kedelai

Dibanding susu nabati dengan susu pilihan serupa lainnya dan juga susu sapi, hasilnya susu kedelai paling mendekati susu sapi. Terbuat dari kacang kedelai, jenis susu ini cocok untuk mereka yang intoleran laktosa. Susu kedelai kaya akan protein dan dapat membantu mempromosikan pola makan seimbang.

Susu almond

Susu almond merupakan alternatif yang efektif untuk anak dan orang dewasa yang menderita alergi atau intoleransi terhadap susu. Dibandingkan dengan susu beras dan susu kedelai, susu almond secara alami memiliki vitamin dan mineral paling banyak termasuk tembaga, seng, besi, magnesium, kalsium, kalium dan lainnya.

Susu oat

Susu oat mengandung rasa manis alami dan serat larut. Susu oat memiliki kandungan lemak jenuh yang rendah. Susu ini bermanfaat bagi orang dengan intoleransi gluten atau penyakit celiac. Susu vegan yang diperkaya dengan kalsium dan vitamin D ini juga meningkatkan kesehatan tulang.

Susu rami

Susu rami tanpa rasa dapat membantu menurunkan kolesterol seseorang secara keseluruhan. Karena kaya akan asam lemak omega-3 yang disebut asam alfa-linolenat (ALA), susu rami dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan peradangan.

Susu kelapa atau santan

Lemak trigliserida dalam santan membantu meningkatkan energi, hal ini dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan seseorang. Lemak Trigliserida rantai menengah (MCT) dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung seseorang.

Susu beras

Kehadiran antioksidan dalam susu beras dapat membantu mencegah timbulnya infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Susu beras memiliki kandungan yang sangat rendah lemak, sehingga cocok untuk diet penurunan berat badan. (Ist)



AKHIR TAHUN 2021, MOBIL FIAT SUDAH MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK

Pada akhir tahun 2021, sebanyak 60 persen dari model mobil yang ditawarkan oleh merek Fiat Chrysler akan dialiri listrik, baik hibrida (hybrid) atau listrik penuh (full electric).

"Pada akhir 2021, dari semua model Fiat yang ditawarkan, 60 persennya akan dialiri listrik, lebih baik dari rata-rata pasar," kata Kepala EMEA untuk merek Fiat, Lancia dan Abarth, Luca Napolitano, dikutip dari Reuters, Rabu.

Fiat tahun ini telah meluncurkan mobil kecil full electric Nuova 500, lalu ada juga model Panda dengan versi hybrid, bersama dengan hybrid Y -- satu-satunya kendaraan Lancia yang saat ini ditawarkan Fiat.

Lebih banyak model Fiat diharapkan ditawarkan dalam versi hibrida di masa depan, termasuk SUV kompak 500X dan sedan Tipo.

Meneguhkan niatnya ini, Fiat Chrysler

bersama dengan Engie EPS, sebuah perusahaan yang berfokus pada sistem penyimpanan energi dan microgrid, berencana untuk mendirikan usaha patungan untuk meningkatkan mobilitas listrik dari kedua perusahaan tersebut.

"Fiat Chrysler dan Engie EPS yang berbasis di Italia, telah menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan untuk mendirikan usaha patungan pada kuartal pertama di tahun 2021," kata mereka beberapa waktu lalu.

Usaha baru ini akan menawarkan rangkaian lengkap mulai dari produk hingga solusi, termasuk perumahan, bisnis dan infrastruktur pengisian daya publik serta paket energi hijau untuk pelanggan kendaraan listrik di seluruh Eropa.

Fiat Chrysler meluncurkan setidaknya 500 mobil listrik berukuran kecil dan be-

berapa model hybrid dari Fiat, Jeep dan Maserati tahun ini dalam upaya untuk mengejar saingan dalam perlombaan mobilitas ramah lingkungan.

Dalam rencana lima tahun berjalan hingga akhir 2022, FCA berjanji untuk menginvestasikan sekitar 9 miliar euro yang akan digunakan untuk membangun kendaraan elektrifikasi dari total 45 miliar euro, dan meluncurkan sekitar 30 model listrik, baik yang sepenuhnya listrik atau hibrida.

Dikutip dari siaran resmi Fiat beberapa waktu lalu, produsen mobil asal Italia itu telah mulai membersihkan fasilitas pabrik untuk mendukung kegiatan operasional dari 6.000 karyawan.

Fiat juga membersihkan lebih dari 300.000 meter persegi bengkel, dan memasang 130 dispenser pembersih tangan, monitor video dan kamera suhu tubuh (Ant).

foto: Gabby Orcutt/Unsplash

COBA ATASI KUKU CANTENGAN DENGAN CARA ALAMI INI

Mengalami cantengan memang sangat menyakitkan. Sebab cantengan menyebabkan inflamasi sehingga terasa sakit saat dipegang. Bahkan pada beberapa kasus, cantengan juga bisa membuat kuku mengandung nanah. Untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan beberapa bahan alami ini.



CUKA APEL

Cuka apel merupakan salah satu bahan alami yang terkenal memiliki banyak manfaat. Salah satunya untuk mengatasi cantengan. Hal ini disebabkan dikarenakan cuka apel mengandung antimikroba dan antibakteri. Meskipun bahan ini cukup efektif di gunakan, namun baunya memang sedikit menyengat. Bau ini muncul sebagai reaksi cuka apel yang sedang mengobati cantenganmu.

Jika kamu tetap ingin menggunakannya, celupkan kapas pada cuka apel lalu aplikasikan pada daerah kuku yang terinfeksi. Tempelkan selama beberapa saat agar meresap ya, Beautynesian.



BAKING SODA

Cantengan terjadi karena bakteri bisa bertahan pada area lingkungan yang asam. Jadi untuk mengatasinya, kamu bisa mengubah pH kulit agar mengurangi pertumbuhan bakteri dan mengurangi gejala cantengan. Nah, bahan yang bisa kamu gunakan adalah baking soda. Sebab, bahan yang satu ini bisa digunakan untuk mengurangi keasaman.

Caranya, campurkan 1 sendok teh baking soda dengan beberapa tetes air. Setelah itu, aplikasikan pada area kuku yang terinfeksi. Lakukan cara ini 2 hingga 3 kali dalam sehari agar hasil lebih maksimal



ALOE VERA

Bahan yang memiliki banyak manfaat yang satu ini juga dapat kamu gunakan untuk mengobati cantengan. Sebab, aloe vera mampu berperan sebagai antibakteri dan antiseptik. Bahan yang memiliki banyak manfaat yang satu ini juga dapat kamu gunakan untuk mengobati cantengan. Sebab, aloe vera mampu berperan sebagai antibakteri dan antiseptik.

Bukan hanya itu saja, aloe vera juga mengandung antioksidan polyphenol untuk mengurangi inflamasi akibat cantengan. Cara untuk menggunakannya juga mudah kok, Beautynesian. (Ist)

Corona Indonesia (dari hal 1)

Penambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia kembali mencatat rekor baru. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat 8.369 temuan kasus baru, per Kamis (3/12). Menurut grafik tersebut, ini merupakan catatan penambahan kasus tertinggi sepanjang masa pandemi di Tanah Air.

Sementara, jumlah pasien sembuh menjadi 462.553, dan kasus kematian akibat pandemi mencapai 17.355 jiwa. Melihat hal tersebut, Presiden Joko Widodo berharap tidak ada gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Waspada agar jangan sampai terjadi gelombang yang kedua yang akan sangat merugikan upaya dan pengorbanan yang telah kita lakukan," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020, dipantau melalui tayangan YouTube Bank Indonesia, Kamis (3/12). Jokowi pun kembali mengingatkan semua pihak untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pertanyaannya, apakah kita sudah mencapai puncak Covid-19? Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono memiliki jawabannya, "Belum."

Kendati keadaan sudah sangat mengkhawatirkan, Pandu menilai ini semua belum sampai puncak pandemi Covid-19 di Indonesia. "Karena tidak ada upaya untuk mencegahnya," kata Pandu.

Bulan ini, berbagai agenda yang berpotensi meningkatkan mobilitas dan dengan demikian kemungkinan penularan terpampang di depan mata. Pada 9 Desember, akan dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah serentak di 270 daerah.

Beberapa minggu setelahnya, akan ada libur panjang akhir tahun mulai dari sebelum Natal hingga tahun baru. Pada awal tahun, sekolah-sekolah akan kembali dibuka untuk pembelajaran tatap muka.

Di sisi lain, kemampuan tes dan penelusuran riwayat kontak kasus masih belum mengalami perbaikan. Sepanjang 24-30 November, tes digelar terhadap 247.244 orang alias masih di bawah standar WHO untuk Indonesia yakni 267.000 orang per pekan. Laboratorium pengujian sampel swab pun belum tersebar merata. Sebanyak 54 persen laboratorium berada di Pulau Jawa, paling banyak ada di Jawa Timur dengan 78 laboratorium. Sementara area luar Jawa hanya mendapat sisanya, yakni 185 laboratorium (44 persen). Paling sedikit di Sulawesi Utara, hanya 1 laboratorium. "Jadi sepertinya virus itu terus difasilitasi oleh kebijakan pemerintah," simpul Pandu.

Terpisah, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih menuturkan penuhnya rumah sakit berarti beban kerja tenaga kesehatan juga bertambah. Artinya pula, peluang tenaga kesehatan untuk

terpapar dan gugur akibat Covid-19 juga semakin besar. "Dokter saja dengan meningkatnya angka yang tinggi ini dilaporkan banyak yang gugur. Sekarang sampai 180 dokter yang gugur, yang terlapor," kata Daeng.

Akibat Beda Data

Terpisah Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, mengungkapkan bahwa ada beberapa daerah memiliki data perkembangan Corona yang berbeda dengan pusat. Perbedaan data ini dikaitkan dengan penambahan kasus Covid-19.

"Berdasarkan hasil konsolidasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan Kementerian Kesehatan ada beberapa provinsi yang memiliki perbedaan data dengan pusat," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Kamis (3/12). "Seperti contoh Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Papua," imbuhnya.

Wiku mengatakan ada kaitan antara perbedaan data dan penambahan kasus Corona. Dia menyebut perbedaan data ini terjadi karena sistem yang belum optimal. "Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada hari ini terdapat penambahan kasus yang sangat signifikan, yaitu sebesar 8.369 kasus. Angka sangat tinggi ini salah satunya disebabkan karena sistem yang belum optimal untuk mengakomodasi pencatatan, pelaporan dan validasi data dari provinsi secara real time," tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang disampaikan Satgas Covid-19, tambahan kasus harian tertinggi terjadi di Papua sebanyak 1.755 kasus. Pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 102 orang dan meninggal dunia 1 orang.

Posisi selanjutnya Jawa Barat dengan tambahan 1.648 kasus. Sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh 253 orang dan

meninggal dunia 221 orang. Kemudian DKI Jakarta menyumbang 1.153 kasus baru. Di ibu kota pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 973 orang, sedangkan meninggal dunia 26 orang.

Meski demikian diakui Wiku, penambahan kasus ini tak bisa ditoleransi. "Ini adalah angka yang sangat besar dan tidak bisa ditolerir," ujar Wiku.

Satgas Covid-19 menyebut bahwa kepatuhan memakai masker dan jaga jarak semakin menurun. Sehingga, terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada akhir bulan November.

Saat periode libur panjang misalnya, kepatuhan memakai masker hanya sebesar 59,32 persen. Sedangkan untuk jaga jarak sebesar 43,46 persen. "Dapat kita simpulkan bahwa liburan panjang merupakan momentum pemicu utama penurunan kepatuhan disiplin protokol kesehatan dan kepatuhan tersebut semakin menurun," sambung Wiku.

Menurut Wiku, standar kepatuhan masyarakat menggunakan masker adalah 75 persen dari penduduk. Indonesia berada di bawah standar kepatuhan. "Saat ini Indonesia hanya mampu mencapai 59,2 persen, bahkan, 42,53 persen dalam kepatuhan menjaga jarak dan tidak berkerumun," katanya.

Selain itu, Wiku juga menjabarkan beberapa lokasi kerumunan dengan tingkat tidak patuh untuk memakai masker. Lokasi tersebut berada di restoran, rumah, tempat olahraga, jalan umum dan tempat wisata.

"Adapun lokasi kerumunan dengan tingkat tidak patuh untuk memakai masker tertinggi berada di restoran dan kedai sebesar 30,8 persen, di rumah sebesar 21 persen, tempat olahraga publik sebesar 18,8 persen, di jalan umum sebesar 14 persen dan tempat wisata sebesar 13,9 persen," katanya. (ist,ins)



BUPATI BANGGAI LAUT 'DISEROK' KPK, DITEMUKAN 2 KARDUS ISI RP 1 M

Jakarta - KPK kembali menunjukkan taringnya melalui operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, KPK menangkap Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo. Ini menjadi kali ketiga komis anti-rasuah tersebut 'menyerok' koruptor dalam waktu 9 hari terakhir.

KPK menemukan uang yang diduga terkait suap untuk kepentingan kampanye pemenangan pilkada. "Barang bukti yang didapat sementara 2 kardus berisi uang sejumlah lebih dari Rp 1 miliar," ucap sumber, Kamis (3/12).

Penangkapan itu dilakukan sekitar pukul 12.30 WIB. Berdasarkan sumber detikcom, Wenny ditangkap bersama tim pemenangannya untuk pilkada. Wenny diketahui maju lagi dalam pilkada untuk periode kedua bersama Ridaya La Ode Ngkowe.

OTT itu sebelumnya juga sudah dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Dia meminta semua pihak bersabar menunggu kerja KPK di lapangan tuntas. "Betul," kata Ghufron.

Mereka yang ditangkap KPK masih

berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status mereka.

Menurut situs LHKPN KPK Wenny Bukamo memiliki harta senilai Rp 5,435 miliar. Wenny terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 3 Maret 2020. Pelaporan LHKPN Wenny masuk kategori pelaporan periodik. Wenny tercatat memiliki dua bidang tanah yang tersebar Kota Surabaya dan Banggai, serta 4 bidang tanah dan bangunan yang berada di Surabaya, Banggai dan Banggai Laut. Tanah dan bangunan yang dimiliki Wenny senilai Rp 5,506 miliar.

Untuk kendaraan, Wenny memiliki satu unit mobil sedan senilai Rp 25 juta dan dua sepeda motor senilai Rp 4,5 juta. Kendaraan yang dimiliki Wenny senilai Rp 29,5 juta. Selain itu, Wenny tercatat memiliki harta berupa kas dan setara kas senilai 350 juta. Dia juga tercatat memiliki utang senilai Rp 450 juta. Dengan demikian, total harta kekayaan Wenny sebesar Rp 5,435 miliar.

Sebelumnya, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo,



pada Rabu (25/11) dini hari di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng terkait ekspor benur. Penangkapan Edhy dilakukan setelah 4 bulan KPK absen menggelar OTT.

Selang 2 hari, tepatnya pada Jumat (27/11), KPK menangkap Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna. Ajay ditangkap diduga terkait suap izin pengembangan pembangunan RS Kasih Bunda Cimahi. Ia diduga dijanjikan Rp 3,2 miliar oleh Komisaris Rumah Sakit Bunda Kasih, Utama Yonathan. (ist,ins)

TANGKAPAN HASIL OTT KPK ERA FIRLI



BUPATI BANGGAI LAUT WENNY BUKAMO

OTT dilakukan pada Kamis (3/12/2020) siang. Wenny ditangkap bersama 5 orang lain di antaranya tim sukses di Pilkada dan kontraktor. Uang senilai Rp 1 miliar yang ditaruh di 2 kardus diamankan dalam OTT tersebut. Diduga, uang tersebut untuk mendanai kampanye pemenangan Pilkada.



WALIKOTA CIMAH AJAY MUHAMMAD PRIATNA

OTT dilakukan pada Jumat (27/11/2020)

Barang bukti : Ditemukan uang sekitar Rp 400 juta. Uang itu diduga merupakan bagian dari commitment fee sekitar Rp 3 miliar.

Kasus : Diduga terkait proyek pembangunan Rumah Sakit



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) EDHY PRABOWO

OTT dilakukan pada Rabu (25/11/2020) di Bandara Soekarno-Hatta

Barang bukti : mulai dari jam tangan Rolex, tas Hermes, sepeda hingga tas koper merek Louis Vuitton dengan harga total mencapai Rp 750 juta

Kasus : Diduga menerima uang suap senilai Rp 3,4 miliar terkait kasus ekspor benih lobster

Status : Tersangka bersama 6 orang lainnya.



KOMISIONER KPU WAHYU SETIAWAN

OTT dilakukan pada Rabu (8/1/2020)

Barang bukti : uang sebesar Rp.400 juta dalam bentuk dollar Singapura

Kasus : dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024

Status : divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan



BUPATI SIDOARJO, SAIFUL ILAH

OTT dilakukan pada Selasa (7/1/2020)

Barang bukti : uang senilai total Rp 1.813.300.000

Kasus : terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo

Status : divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan



BUPATI KUTAI TIMUR, ISMUNANDAR

OTT dilakukan pada Kamis (2/7/2020)

Barang bukti; Uang senilai Rp 170 juta

Kasus : Suap terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Status : Tersangka bersama 6 orang lainnya



PEJABAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Status : Perkara itu diserahkan ke Polda Metro Jaya dan kini kasusnya sudah distop.